

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dalam Perspektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indoneia*, 3(2), 20-29.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). *Akuntabilitas Dana Desa*. <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
- Harwida, G. A. (2018). *Pelaksanaan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak oleh Bendahara Desa*. Diakses tanggal 15 Desember 2021, dari <https://news.ddtc.co.id/pelaksanaan-pemotongan-dan-atau-pemungutan-pajak-oleh-bendahara-desa-14103>
- Fadhil, M. I. I., & Subandi, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-16.
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2(2), 21-28.
- Aribowo, I., & Usman, F. (2018). Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *Jurnal Sembadha*, 1(1), 237-241.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 52-62.
- Hermanto, B. (2013). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pada Belanja Barang Jasa Dan Belanja Modal (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(3).
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (n.d.). *PPh Pasal 4 Ayat (2)*. <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.
- Desa Punggulan. (n.d). *Visi dan Misi*. punggulan.desa.id/hal-visi-dan-misi.html
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang *Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara*.
- Herawati, N. & Ratnafuri, K. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 471-492.
- Nawawi, M. B. (2017). *Perpajakan Bendahara Desa*. Indeks.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri) tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang *Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah*.